

**REKONSTRUKSI IDENTITAS ETNIK: SEJARAH
SOSIAL POLITIK ORANG PAKPAK DI SUMATERA
UTARA 1958 - 2003**

Budi Agustono, disertasi Jurusan Sejarah, dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 27 Desember 2010.

ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the history of the Pakpak people who have been marginalized politically, economically and culturally in the midst of Toba Batak domination since their settlement in Pakpak between the early 20th to early 21st centuries. The result of the research indicates that power may not only define and revitalize identity, but it is also capable of constructing identity. The reconstruction of ethnic identity may occur because in addition to the existing definition of ethnicity, customary laws and tradition, there is an opportunity for the Pakpak elite to use their power to manipulate ethnic sentiment.

Keywords: identity, power, Pakpak, and North Sumatera

PENDAHULUAN

Pada masa pra kolonial batas fisik geografis Tanah Pakpak menyebar di lima wilayah, yaitu Pegagan, Keppas, Simsim, Kelasén, dan Boang (L.van Vuuren 1910). Pada tahun 1907, ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan ekspansi kekuasaannya dengan memasukkan dan memecah kelima daerah ini ke wilayah administrasi yang berbeda.

Pegagan, Keppas, Simsim berada di wilayah Dairi. Kelasén digabung ke Batak *landen*, tepatnya Parlilitan (*Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* 1905), sedangkan Boang disatukan ke Singkil, Keresidenan Aceh. Pemecahan dan penggabungan Tanah Pakpak ini menyebabkan melemahnya identitas orang Pakpak yang akhirnya memengaruhi aspek politik, sosial, dan budaya orang Pakpak sebagai penduduk asli di tanah kelahirannya sendiri, yang dianggap sebagai tanah ulayatnya (R.H. Barnes dan Andrew Gray 1995; Jackson Preece 2005).

Setelah meluaskan kekuasaannya, pemerintah kolonial Belanda membangun mesin birokrasinya di Tanah Pakpak. Sejalan dengan ini, sejak tahun 1905 misionaris Jerman yang mengawali kegiatannya dari Tanah Batak Toba mulai menyebarkan agama Kristen ke Tanah Pakpak yang di masa itu penduduknya masih banyak menganut agama suku. Ekspansi kekuasaan kolonial ke Tanah Pakpak mendorong orang Batak Toba bermigrasi ke daerah ini, terutama karena berkait erat dengan kebijakan kolonial yang menarik mereka untuk mengisi birokrasi pemerintahan.

Dalam waktu relatif singkat para migran Batak Toba dapat menguasai sumber daya politik dan ekonomi, sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok etnik yang mendominasi ruang politik, ekonomi, dan budaya di tempat yang baru itu. Dalam kaitannya dengan Tanah Pakpak, dominasi budaya, politik, dan ekonomi etnik Batak Toba dimulai sejak mereka bermigrasi ke wilayah ini pada awal abad ke dua puluh sampai sekarang. Sejak itu berkali-kali orang Pakpak bermaksud melawan dominasi etnik Batak Toba dengan merekonstruksi identitas etniknya sekaligus ingin pula menguasai kembali kontrol teritorial atas penguasaan sumber daya alam yang telah dikuasai kelompok etnik lain (Dirk Roth 2005). Keadaan itu terus berlangsung seperti yang terjadi pada awal 1990-an sampai 2003.

METODE PENELITIAN

Sumber tertulis khusus tentang etnik Pakpak baik berupa dokumen pemerintahan maupun laporan pribadi, relatif terbatas. Keterbatasan sumber tertulis ini disebabkan sumber daya manusia yang dimiliki kelompok etnik ini, terlambat menerima akses pendidikan. Mengingat sumber tertulis tentang etnik Pakpak relatif terbatas, sebagian data

dalam penelitian ini tergantung pada sumber lisan yang merupakan hasil wawancara. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa budaya lisan orang Pakpak cukup kuat sehingga orang kurang memberi perhatian pada pendokumentasian tentang masyarakatnya sendiri. Selain itu kajian akademis tentang kelompok etnik ini masih sedikit. Untuk itu diperlukan sumber lisan, yaitu wawancara dan membangkitkan kembali ingatan kolektif informan Pakpak tentang masa lampau mereka.

Bagi sejarawan, ingatan, *memory*, telah dipakai menjadi *a tool of research* (James Fentress dan Chris Wickham 1992). Dalam kaitannya dengan ingatan ini, orang Pakpak cukup fasih melacak ulang peristiwa masa lalu yang dialami generasi tuanya. Akan tetapi, ketika ingatan itu dihubungkan dengan kepemilikan catatan-catatan tertulis, tidak satu pun orang Pakpak yang mempunyainya. Namun demikian, ingatan kolektif dari generasi tua diturunkan dan dikomunikasikan kepada generasi muda Pakpak. Meski ingatan kolektif yang juga menjadi *a social reality* ini diteruskan ke generasi muda Pakpak, hanya saja karena ingatan bukan sekumpulan dokumentasi peristiwa, tetapi menyangkut tafsiran dan emosi, maka ingatanpun diperebutkan, dinegosiasikan, dilupakan, digali, dan diperbarui kembali oleh masyarakat pendukungnya (Jacob J. Climo dan Maria G. Cattell 2002).

Berbeda dengan etnik Pakpak, pengumpulan data melalui wawancara dengan orang Batak Toba, relatif terbuka terutama generasi tuanya sepanjang mereka masih menggali informasi mengenai asal mula ke Tanah Pakpak. Namun jika pertanyaan menyangkut pemberontakan daerah tahun 1958 dan kekerasan politik yang berdampak terhadap etnik Pakpak, mereka memilih tidak menjawab. Penutur masa-masa yang memedihkan, penuh ketegangan dan kekerasan politik ada di tangan generasi tua Batak Toba, tetapi mereka tidak ingin peristiwa itu dibongkar kembali.

LANDASAN TEORI

Sampai saat ini kajian etnisitas dan identitas sebagian besar dikerjakan para ahli antropologi dan sosiologi, sedangkan sejarawan masih sedikit yang mencurahkan perhatiannya pada tema seperti ini. Relasi antara etnisitas dan identitas saling berkelindan. Etnisitas dapat berubah-ubah, bergantung dengan siapa ia berinteraksi. Identitas etnik merupakan

fenomena yang adaptif, ia dapat merespons situasi yang berubah-ubah batasan-batasan kolektifitas yang meluas, bahkan orang atau sebagian orang dapat keluar dan masuk dalam lebih dari satu komunitas. Dengan demikian, etnisitas merupakan suatu hal yang dinamis, tidak pasti, dan selalu berubah dalam hubungannya dengan politik dan sosial (Milton J. Esman 1994). Studi ini didasarkan atas kerangka berpikir tentang etnisitas yang tidak statis, tetapi ia merupakan hasil dari konstruksi sosial, dan sebagai konsekuensinya etnisitas dan identitas sangat cair, situasional (Jocelyn Linnekin dan Lin Poyer 1990). Etnisitas tidak muncul secara *given* (Urmila Phadnis dan Rajat Ganguly 2001; Virginia Horschoft 2002), tetapi lahir karena didefinisikan dan diredefiniskan, dikonstruksi dan direkonstruksi oleh para elit untuk kepentingan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, etnisitas merupakan mekanisme organisasi sosial untuk berkompetisi dalam perebutan sumber daya ekonomi dan politik (David Brown 1994; Subhash Chandra Nayak 2001). Secara teoretik rekonstruksi identitas dapat terjadi karena adanya pendefinisian etnisitas, (Paul Brass 1991; Cora Govers dan Hans Vermeulen 1997) adat dan tradisi atau hal-hal yang dianggap *given* dan primordial, di samping adanya peluang elit lokal bermain dalam kekuasaan dan memanipulasi sentimen etnisitas (primordial) untuk tujuan politik, misalnya untuk pembentukan wilayah baru. Oleh karena perhatian utama studi ini tentang rekonstruksi identitas yang bersinggungan dengan konsolidasi kesadaran etnik, dan manipulasi etnisitas untuk tujuan politik dan ekonomi, seperti pembentukan organisasi komunal, menggagas berdirinya gereja etnik, mendesak pembentukan kabupaten baru berbasis kesukuan, maka studi ini memakai pendekatan instrumentalisme dalam menjelaskan rekonstruksi identitas etnik Pakpak.

PEMINGGIRAN PEMIMPIN ADAT

Pemerintah kolonial segera setelah berkuasa di Tanah Pakpak, segera mengadakan perubahan administrasi atas wilayah ini. Perubahan administrasi yang dilakukan pemerintah kolonial berakibat pada kepemimpinan lokal masyarakat Pakpak, seperti *takal aur* dan *pertaki*. *Takal aur* adalah pemimpin *suak* atau kesatuan adat. Orang Pakpak mempunyai lima *suak*, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *takal aur*. Pada masa itu di Tanah Pakpak ada lima *takal aur*, yaitu *takal*

aur Keppas, *takal aur* Pegagan, *takal aur* Kelasén, *takal aur* Boang, dan *takal aur* Simsim. Wilayah kekuasaan *takal aur* bergantung pada luas wilayah *suak*.

Cakupan wilayah otoritas adat seorang *takal aur* sangat luas, dan kekuasaannya menjangkau penduduknya yang berada dalam kesatuan adat yang terpecah-pecah. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, yang lebih banyak mengambil peran adalah *pertaki-pertaki* yang berada di wilayah kesatuan adat masing-masing. Fungsi kepemimpinan *takal aur* yang demikian ini, bersifat simbolik. Ia lebih sebagai pemimpin adat daripada pemimpin administratif politis. *Takal aur* membawahi *pertaki*. *Pertaki* adalah pemimpin kesatuan marga di wilayah tertentu dan kedudukannya terkait dengan pembukaan kuta atau kampung.

Pada masa kolonial dilakukan beberapa perubahan jabatan *takal aur* dan *pertaki* yang turun-temurun semasa tradisional diubah menjadi jabatan yang harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda. Selain itu, sebutan *pertaki* yang berasal dari bahasa Pakpak diganti menjadi kepala kampung, meskipun berubah nama, tetapi fungsi tradisionalnya dapat dipertahankan dan jabatan kepala kampung tetap diserahkan kepada orang Pakpak. Hanya saja, siapa yang diangkat menjadi kepala kampung harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda, masing-masing menjadi raja *ikuten* dan kepala kampung. Pemerintah Belanda telah mengubah jabatan tradisional struktural *takal aur* dan *pertaki* masyarakat menjadi jabatan politis raja *ikuten*, meskipun orang yang menempati jabatan tersebut tidak diubah.

Perubahan jabatan tradisional menjadi jabatan politis berakibat pada keberadaan kesatuan adat dan marga semakin dilemahkan dan mengalami peminggiran. Implikasinya, orang Pakpak mengalami disorientasi kultural sehingga tidak lagi dapat menegakkan sepenuhnya aturan adat, termasuk asal usulnya (geneologis). Disorientasi kultural inilah yang membuat orang Pakpak menyandar atau berpaling ke budaya kelompok etnik lain, seperti mudahnya orang Pakpak mengaitkan dirinya sebagai bagian dari marga kelompok etnik lain.

PEMINGGIRAN YANG BERLANJUT

Jepang masuk Tanah Pakpak pada tahun 1942, kemudian kebijakan

politik dikeluarkan seperti yang dilakukannya di wilayah lain, yang mengeksploitasi agama (Islam dan Kristen) dan politik (radikal dan konservatif) serta memanfaatkan konflik marga dan etnik di tingkat lokal. Ketika Jepang menduduki Tanah Pakpak, Keresidenan Tapanuli, kebijakan Jepang disesuaikan dengan keadaan setempat. Oleh karena agama Kristen menjadi agama mayoritas di wilayah ini, maka Jepang di Tapanuli terutama di bagian Utara, merangkul penduduk dan pemimpin yang beragama Kristen dalam pengelolaan kekuasaannya. Dalam mengelola kekuasaan, Jepang menghilangkan jabatan kontrolir dan mengubah nama raja *ikuten* menjadi kepala negeri, sedangkan kepala kampung namanya tidak berubah. Sebutan wedana diganti menjadi *guntjo* dan kepala negeri menjadi *sontjo*.

Meskipun jabatan di pemerintahan itu berganti nama, tetapi orang yang mengisi jabatan wedana tetap berasal dari etnik Batak Toba. Sementara itu, tempat orang Pakpak dalam struktur pemerintahan tidak berubah, mereka tetap paling tinggi memegang jabatan kepala negeri dan kepala kampung. Menjelang akhir kekuasaannya, Jepang memangkas peran kepala kampung dan menjadikannya semata-mata pemimpin adat. Sama seperti pada masa kolonial Belanda, Jepang tetap mendistribusikan jabatan kepala negeri dan kepala kampung kepada orang Pakpak, tetapi hanya kepada Pakpak Kristen, sedangkan Pakpak Muslim tidak diberi kesempatan menduduki jabatan tersebut. Pada masa Jepang tempat orang Pakpak, dalam kekuasaan khususnya Pakpak Islam semakin mengecil.

Kemerdekaan Indonesia seperti juga pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang telah mengubah struktur pemerintahan di Tanah Pakpak. Di awal kemerdekaan, Tanah Pakpak oleh Pemerintah Republik Indonesia dimasukkan ke wilayah Keresidenan Tapanuli yang kemudian menjadi Kabupaten Tapanuli Utara. Pada awal kemerdekaan saat mulai melakukan penataan administrasi pemerintahan, termasuk mengelola pemerintahan Dairi, Republik baru ini tidak memerhatikan suara dan aspirasi rakyatnya, apalagi mempertimbangkan keberagaman etnik dan budaya dalam menentukan batasan fisik wilayah. Pertimbangan pluralitas etnik diabaikan. Hal itu semakin jelas manakala kelompok-kelompok etnik kecil dalam jumlah, tidak dikenal, dan secara geografis jaraknya jauh dari Jakarta, ibukota Republik Indonesia. Pengabaian atas keanekaragaman etnik dan budaya membuat pemerintah pusat

sering menganggap kelompok etnik yang satu disamakan dengan yang lain. Akibatnya Residen Tapanuli dapat mengeluarkan surat keputusan penggabungan Tanah Pakpak ke Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1950 tanpa perlu mendengar aspirasi orang Pakpak setuju atau tidak atas penggabungan tersebut. Bagi Kabupaten Tapanuli Utara penyatuan itu sangat strategis, karena elit Batak Toba dapat terus melanggengkan ekspansi politik dan ekonominya di wilayah Tanah Pakpak. Sebaliknya, di mata orang Pakpak, penyatuan itu sangat menyakitkan dan sekaligus mereka dipandang sebagai pelecehan martabat orang Pakpak. Hal itu berarti, dinamika etnopolitik etnik Pakpak terus berfluktuasi dan tempatnya semakin menjauh dan terus terpinggirkan dari pusaran kekuasaan lokal sepanjang masa kolonial Belanda, masa Jepang, dan awal kemerdekaan.

TURUN NAIKNYA KESADARAN ETNIK PAKPAK

Di tengah dominasi politik dan ekonomi etnik yang kuat di Tanah Pakpak, hadir Jauli Manik sebagai pemegang jabatan tertinggi kekuasaan lokal pada saat pergolakan politik 1958. Ia telah membuka lembaran baru dalam kontestasi identitas di Tanah Pakpak. Pengangkatan Jauli Manik ini mendapat dukungan masyarakat Pakpak. Ketika ada usulan pembentukan Kabupaten Pakpak, Jauli Manik mendukung usulan tersebut, bahkan ia aktif terlibat mengkampanyekan pada khalayak luas. Selain mendukung pembentukan kabupaten baru, saat menjadi Koordinator Pemerintahan Jauli Malik telah pula meletakkan fondasi bagi orang Pakpak untuk masuk birokrasi pemerintahan sekaligus membangun basis politik dengan memanfaatkan sentimen kesukuan kelompok etniknya. Ia menyadari selama ini orang Pakpak tidak pernah mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya, ia tidak saja mulai menarik dan mengkader orang Pakpak di pemerintahan, tetapi juga menyempatkan diri memberi perhatian terhadap kebudayaan dan kesenian tradisional yang menghilang dari khasanah kehidupan masyarakat Pakpak. Ia menghidupkan kembali kebudayaan dan kesenian kelompok etniknya dengan cara mendatangi masyarakat Pakpak dan menampilkannya di depan publik. Dalam kekuasaannya yang tidak panjang itu, Jauli Manik mencoba melakukan pencarian kembali identitas Pakpak yang telah melemah tersebut. Sembari menjalankan fungsinya sebagai Koordinator pemerintahan, Ia juga mendorong agar orang Pakpak mencintai adat dan kebudayaan leluhur mereka, misalnya

dengan cara mempromosikan kembali nasi *pelleng*, kuliner tradisional yang nyaris dilupakan.

Upaya membangkitkan dan memperkuat simbol-simbol identitas kelompok etnik Pakpak ternyata bukan persoalan mudah, karena kesadaran etnik dan identitas Pakpak tampak lemah, kalau bukan memudar di tahun 1950-an. Lebih dari itu, akibat adanya ancaman dan teror, banyak orang Pakpak yang mencari selamat dengan cara mengganti marganya menjadi marga Batak Toba, yang berarti perubahan identitas kultural. Penggantian identitas ini menyebabkan batasan etnik antara orang Pakpak dengan orang Batak Toba semakin menjadi kabur, menyusul proses serupa yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Orang Pakpak yang mengalami diskriminasi politik dan budaya, dengan malu-malu mempraktikkan kebudayaannya sendiri, tetapi sebaliknya secara terbuka memakai bahasa dan kebudayaan Batak Toba.

Upaya Jauli Manik menghidupkan kembali kebudayaan dan tradisi bagaikan penawar dahaga di saat orang Pakpak sedang mengalami pengaburan atau pelemahan identitasnya sebagai kelompok etnik. Di tengah saudara-saudaranya yang menukar identitas etniknya ke kelompok etnik lain, Jauli Manik mencoba menggali tradisi dan cerita-cerita rakyat yang pernah hidup di masyarakat mengenai kebesaran orang Pakpak masa lampau sembari mengampanyekan keinginan untuk membentuk Kabupaten Pakpak.

Ketika kesadaran etnik Pakpak mulai naik dan mereka berharap sangat terhadap pembentukan Kabupaten Pakpak, ternyata perwujudannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Kabupaten baru yang dibentuk pada tahun 1964 bernama Kabupaten Dairi, bukan Kabupaten Pakpak seperti yang dibayangkan semula. Harapan orang Pakpak agar Jauli Manik, yang saat itu menjabat Koordinator Pemerintahan di Tanah Pakpak, memimpin Kabupaten yang baru, juga tidak tercapai. Sebaliknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan seorang Batak Toba sebagai Kepala Daerah, yang tentu saja semakin memperdalam kekecewaan orang Pakpak.

Pengusuran Jauli Manik membawa implikasi politik dan kesadaran etnik, serta konsolidasi identitas Pakpak yang mulai menaik berangsur-angsur menurun kembali, karena tidak ada lagi energi kekuasaan yang mengkonsolidasinya. Pengangkatan etnik Batak Toba sebagai Bupati

Dairi telah mengoyak kembali kesadaran etnik Pakpak yang sedang meninggi. Orang Pakpak bagaikan anak ayam kehilangan induknya, karena tidak lagi memiliki patron politik yang dapat memproteksi kepentingan dan aspirasi penduduk asli ini. Sebaliknya, berdirinya Kabupaten Dairi tanpa dipimpin oleh orang Pakpak, menguatkan kembali dominasi Batak Toba terutama di bidang politik dan ekonomi. Di samping itu pengangkatan etnik Batak Toba sebagai Bupati Dairi semakin mencemaskan orang Pakpak, dan mereka membayangkan akan mengalami diskriminasi politik seperti masa sebelumnya.

Konsolidasi etnik yang terus melemah ditambah lagi dengan meluasnya kecemasan akan punahnya orang Pakpak dari muka bumi ini, membuat para pemuka masyarakat pada tahun 1970 menyelenggarakan seminar tentang adat istiadat Pakpak. Setelah seminar, keinginan mempertegas identitas Pakpak menguat. Hal itu tercermin dari adanya kerinduan mengangkat simbol-simbol budaya yang sudah lama menghilang seperti nama desa, sungai atau gunung yang telah beralih nama Batak Toba, dikembalikan ke dalam bahasa Pakpak. Sebagai tindak lanjut kembali digunakan nama desa Bintang yang berasal dari bahasa Pakpak yang pernah diganti menjadi Parsaoran dalam Batak Toba kembali digunakan. Hal sama dilakukan pada nama-nama desa yang telah diubah ke dalam bahasa Batak Toba seperti Panguan Nauli, Pandaro, dan Simbolon dikembalikan ke nama-nama desa dalam bahasa Pakpak menjadi Sitindjo, Pendaroh, dan Sibellin. Demikian pula sebutan bukit (*dolok*) dan sungai (*aek*) yang sebelumnya diganti ke dalam bahasa Batak Toba ini, dikembalikan lagi ke nama asli bahasa Pakpak menjadi *delleng* dan *lae*.

PEMBENTUKAN ORGANISASI BERBASIS ETNIK

Selama ini konsolidasi identitas dan pembentukan kesadaran etnik Pakpak cenderung naik turun, bergantung situasi dan kondisi. Naik turunnya konsolidasi identitas ini terkait dengan ada-tidaknya dukungan kekuasaan untuk menopang penguatan kesadaran etnik ini. Pada tahun 1950-an, pembentukan kesadaran etnik Pakpak berjalan relatif baik karena mendapat dukungan dari kekuasaan yang waktu itu direpresentasikan oleh sosok Jauli Manik. Sesudah Jauli Manik tersingkir dari kekuasaan lokal, pembentukan kesadaran etnik Pakpak menurun tajam, bahkan setelah itu sampai akhir 1980-an konsolidasi etnik hampir-hampir mengalami kemandekan.

Pada tahun 1970-an, orang Pakpak yang melanjutkan belajar ke lembaga-lembaga pendidikan menengah atas di Sidikalang, Kabanjahe, dan Medan, makin membesar, tetapi belum banyak yang meneruskan studinya ke perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan, sebagian dari mereka ada yang kembali ke Sidikalang. Kendati jumlahnya tidak banyak, mereka inilah yang menjadi kelompok terdidik masyarakat Pakpak. Mereka menjadi wiraswastawan, pedagang, dan bekerja di pemerintahan, meskipun pekerjaan yang terakhir ini relatif sedikit dilakukan orang Pakpak. Mereka yang kembali ke Sidikalang hampir-hampir tidak ada yang memasuki wilayah politik, karena memasuki partai pada masa itu bukan persoalan mudah. Dominasi Batak Toba menyurutkan minat orang Pakpak berkecimpung dalam kepartaian, terutama Golkar dan PDI.

Pada tahun 1980-an, pemerintah membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan kota kecamatan dengan ibukota kabupaten, Sidikalang. Pembangunan jalan ini sangat bermanfaat karena membuka akses masyarakat dengan dunia luar dan mempercepat mobilitas sehingga memudahkan orang menjual hasil pertaniannya ke kota lain. Di daerah yang penduduknya dihuni mayoritas orang Batak Toba seperti kecamatan Sumbul, Sidikalang, Parongil, Silima Pungga Pungga dan sebagainya, pembangunan fisik lebih maju daripada daerah Simsim. Pada tahun 1980-an, di Simsim baru ada Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan bank swasta belum ada dan jaringan telepon masih terbatas. Ketimpangan pembangunan antara kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar Sidikalang dan daerah Simsim dilihat oleh kelompok terdidik Pakpak sebagai pengingkaran elit lokal untuk memajukan orang Pakpak. Dalam pandangan kelompok terdidik Pakpak, ketimpangan pembangunan inilah yang melanggengkan kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan etnik Pakpak.

Kelompok terdidik menganggap ketidakmerataan pembangunan ini sengaja diciptakan agar kelompok etnik Pakpak tetap tertinggal dan terus-menerus dapat dikuasai oleh orang Batak Toba. Sementara itu, pada saat yang sama, orang Pakpak tidak ada yang menduduki posisi strategis di pemerintahan kecuali beberapa orang yang duduk di lembaga legislatif. Ketika sebagian besar anggota DPRD Dairi berasal dari luar Simsim mereka tidak mempunyai sensitifitas terhadap keterbelakangan di wilayah ini, sekali pun mereka telah menetap puluhan tahun di Tanah

Pakpak. Bagi kalangan terdidik Pakpak, kebijakan politik dan ekonomi yang diskriminatif ini menyebabkan penduduk asli semakin terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan.

Sejak awal kemerdekaan sampai akhir tahun 1950-an, orang Pakpak mendambakan agar diberi kesempatan memimpin di wilayahnya sendiri. Akan tetapi, harapan itu tidak pernah terwujud, bahkan lebih dari itu, mereka mengalami degradasi posisi politik dan ekonominya di tanah kelahirannya sendiri, sehingga memunculkan rasa frustrasi. Semua ini menyebabkan orang Pakpak, meminjam istilah Ted Robert Gurr (1970) mengalami deprivasi relatif, yang apabila berkepanjangan dapat menjadi pendorong kelompok terdidik Pakpak untuk menggugat atas apa yang dialami kelompok etniknya.

Rangkaian diskusi yang dilakukan secara rutin disadari betul tidak akan pernah dapat menjadi kekuatan tanpa diikuti upaya kongkrit untuk membangkitkan kesadaran dan soliditas etnik Pakpak. Akibat tidak terakomodirnya orang Pakpak dalam kekuasaan lokal, diperlukan wadah sebagai media untuk mengkonsolidasi kesadaran dan mempertegas identitas Pakpak dalam bentuk kekuatan yang terorganisir. Keinginan kelompok terdidik Pakpak itu pada 11 Januari 1990, terwujud dengan mendirikan Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia (IKPPI), seperti Letce Berutu, Malem Pagi Angkat, Usman Effendi Capah, Abdul Angkat, Esron Kaloko, Diko Tinambunan, dan Pandapotan Manik. Salah satu tujuan IKPPI seperti yang tercantum dalam anggaran dasarnya, adalah melestarikan nilai-nilai dan norma kebudayaan Pakpak dalam kehidupan masyarakat Pakpak.

Pada awal berdirinya, IKPPI mengajak orang Pakpak di mana pun berada untuk berbahasa Pakpak, baik di lingkungan keluarga maupun di tempat terbuka. Di samping mengampanyekan pemakaian bahasa Pakpak, IKPPI juga menganjurkan agar perkawinan adat Pakpak harus ditampilkan. Tradisi dan adat yang ditegakkan diharapkan akan menguatkan identitas Pakpak. Setelah kampanye pemakaian bahasa Pakpak, orang Pakpak yang tadinya malu untuk memakai bahasanya sendiri, mulai banyak yang berbahasa Pakpak di tempat umum, meskipun awalnya ada perasaan canggung. Kampanye IKPPI ini bagaikan bola salju yang menggelinding cepat. Orang Pakpak yang memakai bahasa ibu sendiri semakin hari semakin meluas, dan rasa canggung atau malu seperti sebelumnya, perlahan-lahan mulai

menghilang. Jika sebelumnya banyak keluarga Pakpak yang berbahasa Batak Toba, setelah IKPPI mengumandangkan pemakaian bahasa Pakpak, orang Pakpak tumbuh dengan percaya diri dan meninggalkan bahasa Batak Toba, serta menggantinya dengan bahasa Pakpak.

MENDEKAT KE KEKUASAAN LOKAL

Di tengah upaya IKPPI melakukan rekonstruksi identitas kelompok etniknya dan memperkuat posisi tawar dengan kekuasaan lokal pada awal tahun 1990-an, tanpa pernah terbayangkan sebelumnya, telah terjadi perubahan pimpinan puncak kekuasaan Kabupaten Dairi, dari orang Batak Toba ke etnik campuran Pakpak – Batak Toba. Jabatan Bupati Dairi yang lebih dari tiga puluh tahun dikuasai orang Batak Toba digantikan oleh Isodorus Sihotang pada tahun 1995. Naiknya Isodorus Sihotang sebagai Bupati Dairi (1994 – 1999) membawa dampak politik dan ekonomi bagi orang Pakpak, terutama dalam penguatan identitas etnik Pakpak. Dalam menjalankan kekuasaan, sikap politiknya memihak, memberi kesempatan, dan dalam batas tertentu memproteksi dan memberi konsesi politik kepada orang Pakpak. Isodorus Sihotang tidak hanya semata-mata berperan sebagai Bupati Dairi, melainkan juga menjadi salah seorang perumus dan pengkonstruksi identitas Pakpak. Sepanjang masa jabatannya memimpin Kabupaten Dairi, ia memberikan peluang kepada orang Pakpak untuk memasuki birokrasi pemerintahan dan mendistribusikan posisi-posisi tertentu kepada orang Pakpak. Di bawah kepemimpinan Isodorus Sihotang, jabatan camat yang didominasi oleh orang Batak Toba, berangsur-angsur dikurangi, dan kemudian digantikan oleh orang Pakpak. Dari delapan kecamatan di Dairi, empat kecamatan diserahkan ke etnik Pakpak. Selain menyeimbangkan jabatan Camat, ia juga melakukan pergantian beberapa Kepala Dinas dan Kepala Badan yang sebelumnya dipegang orang Batak Toba kepada etnik Pakpak.

Kebijakan Bupati Dairi, Isodorus Sihotang, pada waktu itu dapat dikatakan sebagai penataan politik keseimbangan, agar etnik Pakpak dapat memasuki dan mendapat akses politik dalam kekuasaan lokal. Politik keseimbangan yang dilakukannya didasarkan atas pertimbangan bahwa sumber daya orang Pakpak untuk menduduki berbagai jabatan dalam birokrasi pemerintahan telah memadai. Selama ini kesempatan itu tertimbun oleh diskriminasi politik dan orang Pakpak yang

termarginalisasi dalam kekuasaan lokal. Isodorus Sihotang menyadari bahwa politik keseimbangan ini secara diam-diam mendapat reaksi dari kalangan Batak Toba. Agar tidak menimbulkan keguncangan politik dalam pemerintahannya, ia hanya menempatkan beberapa orang Pakpak menjadi Kepala Dinas dan Camat. Pada saat yang sama orang Pakpak sendiri akan menilai penempatan Kepala Dinas dan Camat dalam birokrasi pemerintahan. Hal itu menandakan bahwa penduduk asli mulai diperhitungkan dalam kekuasaan lokal.

LAHIRNYA GEREJA ETNIK

Sejak orang Pakpak dibaptis menjadi Kristen pada awal abad ke-20, sampai awal tahun 1990-an, tempat ibadah mereka adalah di gereja HKBP. Media komunikasi yang dipakai di gereja HKBP adalah bahasa Batak Toba, bukan bahasa Pakpak, sekali pun banyak jemaatnya yang Pakpak Kristen. Nyanyian, liturgi, doa, dan Injil menggunakan bahasa Batak Toba, sehingga orang Pakpak Kristen melalui gereja cepat mengerti dan lancar berbahasa Batak Toba. Demikian pula dengan penginjil dan pendeta Kristennya, yang semua berasal dari Batak Toba. Sampai kemerdekaan, belum ada orang Pakpak yang menjadi pendeta. Baru di tahun 1953, ditasbihkan pendeta Pakpak pertama bernama Winfred Banurea. Namun karena dididik di lingkungan gereja dan masyarakat Batak Toba, saat melayani jemaatnya ia tetap menggunakan bahasa Batak Toba.

HKBP menolak gagasan pembentukan gereja Pakpak, sedangkan pemuka masyarakat dan pendeta Pakpak tetap bertekad meneruskan keinginannya mewujudkan gereja etnik yang otonom dengan membentuk Panitia Perwujudan Mandiri (PPM) pada tahun 1990. Pada tanggal 6 Juli 1990, PPM mengadakan kebulatan tekad untuk mewujudkan gereja mandiri yang kemudian disampaikan kembali kepada pimpinan pusat HKBP. Mereka bahkan menemui Ephorus HKBP secara langsung untuk meminta penegasan Gereja HKBP “Simerkata Pakpak” untuk dijadikan gereja otonom. Pada Sinode ke-50 tahun 1991, masalah ini dibahas. Hasilnya, memberi otonomi yang lebih luas kepada gereja HKBP “Simerkata Pakpak”. Keputusan HKBP ini menciptakan perpecahan di kalangan PPM, terutama para pendetanya. Ada pendeta yang bersikeras ingin memisahkan diri dari HKBP, tetapi ada pula yang menolak pemisahan dan tetap berada di HKBP.

Pada bulan Agustus 1991, pemuka masyarakat, pendeta, dan kelompok terdidik Pakpak melakukan pertemuan di Medan guna membahas kembali rencana pemisahan gereja. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan, bahwa orang Pakpak boleh mendirikan gereja sendiri. Pada bulan Agustus 1991 itu juga terbentuk gereja etnik Pakpak dengan nama "Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi" (GKPPD) yang terpisah dari HKBP diumumkan secara resmi. GKPPD didirikan dengan tujuan menunjukkan identitas Pakpak, memproklamkan etnik Pakpak bahwa mereka mempunyai gerejanya sendiri, sama seperti kelompok etnik (Kristen) lainnya, dan ingin memerdekakan bahasa, memerdekakan iman, dan memandirikan orang Pakpak.

ORANG PAKPAK DALAM RUANG PUBLIK

Pasca berdirinya Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia (IKPPI) dan Gereja "Kristen Protestan Pakpak Dairi" (GKPPD) menguatkan konsolidasi kesadaran etnik dan energi orang Pakpak untuk meneruskan rekonstruksi identitas etnik. Rekonstruksi identitas etnik yang dirumuskan pemuka masyarakat, elite lokal, dan kelompok terdidik telah merekatkan solidaritas etnik dan merajut kesadaran akan pentingnya menjadi orang Pakpak. Bangkitnya solidaritas etnik dan menaikinya kesadaran etnik, tidak dapat dipisahkan dari adanya dukungan kekuasaan lokal kepada etnik Pakpak, terutama sejak Bupati Isodorus Sihotang memimpin Kabupaten Dairi.

Saat etnik Pakpak sedang mengkonsolidasi kesadaran etniknya di awal tahun 1990-an, di tingkat nasional tengah berlangsung perubahan akibat pengelolaan politik yang membawa dampak yang signifikan terhadap orang Pakpak. Jika sebelumnya kekuasaan Orde Baru cenderung menyebarkan kekerasan dan ketakutan terhadap rakyat (Ross O Carci 2006), memasuki tahun 1990-an kebijakan politiknya mengalami perubahan yang membuka kesempatan bergulirnya gelombang demokratisasi (Jean Grugel 2002).

Menyebarnya gelombang demokratisasi yang imbasnya sampai ke Tanah Pakpak, mendorong tumbuhnya ornop di wilayah ini (Suharko 2005). Di Tanah Pakpak kelahiran ornop dipelopori oleh para aktivis pro demokrasi yang sebagian besar berasal dari kalangan etnik Batak Toba. Mereka adalah mahasiswa dan sarjana lulusan perguruan tinggi

di Medan, Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Salah satu ornop yang berdiri di awal tahun 1990-an didirikan oleh aktivis Batak Toba di Tanah Pakpak adalah Yayasan Sadaahmo, sebuah ornop yang fokus kegiatannya adalah penguatan perempuan di tingkat akar rumput. Keberadaan seorang Pakpak sebagai salah satu pendiri ornop ini merupakan awal keterlibatan kelompok etnik ini dalam gerakan ornop di Sumatera Utara.

Runtuhnya Orde Baru membawa perubahan politik yang dampaknya sampai ke tingkat akar rumput. Jika di masa sebelumnya hanya terdapat tiga partai politik dan jumlah ormas sangat dibatasi dan dikendalikan oleh kekuasaan, setelah runtuhnya Orde Baru di era reformasi atau transisi, partai politik dan ormas bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan di era reformasi atau transisi (Simon Philpott 2000). Di masa pemerintahan transisi ini, orang Pakpak semakin tertantang melibatkan diri dalam jagad politik, terutama parpol. Bermunculannya parpol baru membuka kesempatan bagi orang Pakpak untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik. Hasilnya, beberapa partai baru seperti, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Bulan Bintang (PBB) dipimpin oleh orang Pakpak, terutama Pakpak Muslim. Sementara itu, orang Pakpak juga bergabung dengan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sebagainya, meskipun tidak sebagai pemimpin partai.

Keterlibatan orang Pakpak dalam parpol baru menjadi anak tangga dalam meraih mobilitas sosial secara cepat, menjadi pemimpin partai sekaligus bertransformasi menjadi elit baru di wilayahnya sendiri. Sebagai pemimpin partai, betapapun kecilnya partai itu, merupakan peluang bagi mereka untuk mendekati diri dengan pusat kekuasaan lokal.

MEMASUKI LINGKARAN KEKUASAAN

Harapan etnik Pakpak agar Isodorus Sihotang terpilih lagi untuk periode lima tahun berikutnya tidak menjadi kenyataan, pada tahun 1999 ia digantikan Master Parulian (MP) Tumangger, sebagai Bupati Dairi (2000-2005). Terpilihnya M.P. Tumangger ini tidak pernah dibayangkan oleh orang Pakpak. Mereka beranggapan bahwa jabatan Bupati Dairi akan jatuh kembali ke orang Batak Toba, mengingat sumber daya orang

Pakpak relatif terbatas untuk bertarung memperebutkan posisi Bupati Dairi.

Di masa jabatan M.P. Tumangger sebagai Bupati Dairi, semakin menguatlah kesadaran diri orang Pakpak. Hal itu terlihat dari semakin aktifnya IKPPI melakukan kampanye politik dan kultural untuk menyebarkan penguatan identitas etnik. Menaiknya kesadaran identitas ini dimanfaatkan oleh kaum terdidik Pakpak untuk menampilkan bahasa Pakpak dalam siaran radio swasta komersial di Sidikalang pada tahun 2000. Tujuannya tidak lain untuk menyebarluaskan kampanye pemakaian bahasa Pakpak. Pemakaian bahasa Pakpak dalam siaran radio membuat pendengarnya di kota dan di kampung-kampung terdorong untuk menggunakan bahasa Pakpak. Seiring dengan mengudaranya bahasa Pakpak dalam siaran radio swasta, pada akhir tahun 2001 cerita dongeng Pakpak seperti *Nantagandera*, *Nantampuk Emas*, *Sirube Haji*, dan *Manuk-Manuk Si Pitu Takal*, yang selama ini nyaris menghilang, mulai digali kembali.

Pada masa M.P. Tumangger ini, selain upaya melakukan konsolidasi kesadaran etnik, orang Pakpak mempunyai akses yang lebih besar ke bidang kekuasaan, bahkan ada di antaranya yang menjadi teman diskusi sekaligus menjadi orang kepercayaan M.P. Tumangger. Adanya orang Pakpak yang masuk dalam lingkaran kekuasaan lokal menunjukkan kekuasaan telah memihak ke orang Pakpak. Ketika relasi kekuasaan lokal dengan orang Pakpak semakin mendekat dan kesadaran etnik orang Pakpak mulai terkonsolidasi, pada saat yang sama pemerintah pusat memperkenalkan otonomi daerah pada tahun 2001 (Lili Romli 2007).

Di mata orang Pakpak, otonomi daerah adalah peluang untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan kelompok etniknya. Orang Pakpak memanfaatkan otonomi daerah dengan memaksimalkan diskusi-diskusi terbuka tentang tema-tema demokrasi dan keterbelakangan kelompok etniknya di tanah kelahirannya sendiri. Pada tahun 2001, selain masalah tanah ulayat, juga beredar rumor bahwa orang Batak Toba akan diusir dari Tanah Pakpak. Beredarnya rumor pengusiran ini mendapat tanggapan dari orang Batak Toba, khususnya kalangan pemuda yang melalui pengkonsolidasian diri dengan menggelar pertemuan-pertemuan untuk membicarakan rumor pengusiran yang memanaskan suasana politik saat itu. Rumor pengusiran tersebut, ditanggapi oleh

kalangan pemuda Batak Toba dengan mendirikan lembaga berbasis etnik. *Sadabato* yang artinya satu batu atau satu saudara pada tahun 2001. Berdirinya *Sadabato* ini mendapat dukungan dari pemuka masyarakat Batak Toba. Lembaga ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Batak Toba kepada generasi muda. Walaupun secara formal dikatakan bahwa kelahiran lembaga ini adalah untuk memperkenalkan kebudayaan Batak Toba, tetapi khalayak ramai memahami kalau kelahiran *Sadabato* sebagai respons etnik Batak Toba atas menguatnya rumor pengusiran kelompok etnik ini oleh orang Pakpak.

Pada masa otonomi daerah, selain terjadi ketegangan etnik antara orang Pakpak dan Batak Toba, orang Pakpak memanfaatkan otonomi daerah untuk melakukan konsolidasi kelompok etniknya. Kesadaran politik orang Pakpak semakin menguat di masa ini, dan di masa ini pula pemuka masyarakat, IKPPI, dan juga kaum terdidik lokal yang selama ini merumuskan dan memperkuat identitas kelompok etniknya yang muncul sebagai elit Pakpak (Gerry van Klinken 2002). Ketika kesadaran elit etnik itu menaik, mereka inilah yang memanfaatkan sentimen kesukuan untuk tujuan politik dan ekonomi (Paul Brass 1991). Pemanfaatan dan pemanipulasian sentimen etnik itu terlihat dari keinginan kuat elit etnik Pakpak untuk mendapatkan kekuasaan di wilayahnya sendiri. Salah satunya adalah usulan pemekaran kabupaten baru.

Sejak awal usulan pemekaran kabupaten baru berkumandang, Bupati Dairi, M.P. Tumangger, sepenuhnya mendukung usulan tersebut. Bagi M.P. Tumangger, mendukung pemekaran daerah yang terpisah dari Kabupaten Dairi tidak ada pilihan lain, kecuali kalau etnik Pakpak diberi kekuasaan lebih besar lagi dalam pemerintahan lokal. Dengan pembagian kekuasaan yang demikian, usulan pemekaran daerah akan dapat dihentikan. Akan tetapi hal itu tidak akan dilakukan karena akan memunculkan perlawanan dari etnik Batak Toba. Untuk mencegah konflik terbuka antara kedua kelompok etnik ini, pada tahun 2003 terbentuk kabupaten baru, Kabupaten Pakpak Barat yang terpisah dari Kabupaten Dairi. Hal ini berarti Tanah Pakpak dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Tidak lama setelah berdiri, diangkat Tigor Solin sebagai Bupati Pakpak Barat. Orang Pakpak menyambut penuh semangat atas berdirinya kabupaten baru ini dengan harapan pejabat Bupati Tigor Solin dapat mempercepat

perbaikan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan diri dari dominasi etnik Batak Toba.

KESIMPULAN

Rekonstruksi identitas etnik berkait erat dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak saja dapat mendefinisikan dan merevitalisasi identitas, tetapi ia juga dapat mengkonstruksi identitas. Rekonstruksi identitas etnik dapat terjadi karena adanya pendefinisian kembali etnisitas, adat atau tradisi, di samping adanya peluang elit yang memegang kekuasaan dan memanipulasi sentimen etnisitas. Dalam pendekatan instrumental, salah satu gagasan yang selalu mendapat perhatian secara sosial, bahwa etnisitas merupakan hasil konstruksi dan kemampuan perorangan untuk mengabaikan dan mencampur berbagai warisan etnik dan kebudayaan dalam membentuk identitas kelompok. Dalam konteks inilah etnisitas menjadi sumber daya politik untuk meraih kepentingan kelompok. Dalam kaitannya dengan etnik Pakpak, rekonstruksi identitas kelompok etnik ini jalin berkelindan dengan pemanipulasian etnik dan kekuasaan. Para elit Pakpak setelah berhasil merapat dalam kekuasaan lokal, kemudian melakukan mobilisasi etnik untuk menggapai kepentingan politiknya. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan inilah yang membangkitkan kesadaran politis orang Pakpak. Kesadaran untuk merekonstruksi identitas kelompok etniknya sebagai akibat dari melemahnya batasan kultural kelompok etnik ini. Pelemahan batasan kultural ini diakibatkan oleh migrasi, kristenisasi, tobanisasi yang dimulai awal abad ke-20 sampai tahun 1990-an di wilayah ini.

Dari seluruh proses reka ulang identitas etnik ini menghasilkan transformasi orang Pakpak menuju entitas politik yang sadar akan kelompok etniknya. Entitas politik ini memproduksi simbol teritorial dan simbol politis, yaitu Kabupaten Pakpak Barat. Akan tetapi sebagai akibat dari proses historis yang berbeda-beda dalam sub-kelompok etnik ini, orang Pakpak terbagi lagi menjadi lima *suak* dengan orientasi keagamaan yang berbeda. Hal ini membuat etnik Pakpak menghadapi persoalan dalam membentuk sebuah entitas kultural yang terpancang berdiri tegak sebagai satu kesatuan di tanah adatnya. Gejala ini menjadi tantangan besar dalam mengkonsolidasi dan mengkristalkan konstruksi identitas etnik Pakpak di masa mendatang.

PUSTAKA ACUAN

Buku dan Jurnal

- Barnes, R.H, Andrew Gray and Benedict Kingsbury. 1995. *Indigenous Peoples of Asia*. Ann Arbor: The Association for Asian Studies.
- Brass, Paul. 1991. *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. London: Sage Publication.
- Brown, David. 1994. *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Chandra Nayak. Subhash. 2001. *Ethnicity and Nation Building in Sri Langka*. New Delhi: Kalinga Publications.
- Climo, Jacob J. dan Maria G. Cattell (eds.). 2002, *Social Memory and History: Anthropological Perspectives*. New York: Altamira Press.
- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. 1905. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Esman, Milton. 1994. *Ethnic Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fentress, James dan Chris Wickham. 1992. *New Perspectives on the Past*. Oxford: Blackwell.
- Govers, Cora dan Hans Vermeulen (eds.). 1997. *The Politics of Ethnic Consciousness*. London: Macmillan Press.
- Grugel, Jean. 2002. *Democratization: A Critical Introduction*. New York: MacMillan.
- Guur, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton University Press, 1970.
- Jackson Preece, Jennifer. 2005. *Minority Rights Between Diversity and Community*. Cambridge: Polity Press.
- Kliken, Gerry van. 2002. "Indonesia's New Ethnic Elite," Henk Schulte Nordholt dan Irwan Abdullah (eds.). *Indonesia In Search of Transition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Linnekin, Jocelyn dan Lin Poyer (eds.). 1990. *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Phadnis, Urmila dan Rajat Ganguly. 2001. *Ethnicity and Nation Building in South Asia*. London: Sage Publication.
- Philpott, Simon. 2000. *Meruntuhkan Indonesia Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LKIS.

- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roth, Dirk. 2005. "Lebensraum in Luwu: Emergent Identity, Migration and Access to Land," *Bijdragen tot de Taal, Land – en Volkenkunde*. Leiden: KITLV.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Vuuren, van L. 1910. *Eerste maatregelen in pas geannexeerd gebied*. Den Haag: H.J.van de Garde and Co.

Disertasi dan Makalah

- Carci, Ross O. 2006. *Organizing and Sustaining Hegemony: A Gramscian Perspective on Suharto's New Order Indonesia*. New Zealand: PhD Dissertation, University Of Waikato.
- Horscholt, Virginia. 2002. "The Politics of Ethnicity in the Fiji Islands: Competing Ideologies of Indigenous Paramountcy and Individual Equality in Political Dialogue," *QEH Working Paper Series*, No. 90.